

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK  
USAHA BERSAMA (KUBE) DI DESA HILIR KANTOR  
KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK**

**Oleh:**  
**BREVOO DIRY ASVELA<sup>1\*</sup>**  
**NIM.E1022131003**

Mukhlis<sup>2</sup> Ema Rahmaniah<sup>2</sup>  
\*Email: [markus@student.untan.com](mailto:markus@student.untan.com)

1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan aktivitas sosialisasi Program KUBE telah dilaksanakan di kecamatan Ngabang dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menghadiri kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KUBE. Aktivitas penyaluran dana untuk kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Ngabang telah dilaksanakan, yaitu dari beberapa kelompok usaha telah mendapatkan penyaluran dana dari program KUBE, dana diberikan sebesar 200.000.000 untuk 10 kelompok. Masyarakat Desa Hilir Kantor terdapat 2 kelompok usaha yang mendapatkan Program KUBE. Pemberdayaan Program KUBE di kecamatan Ngabang setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan dalam sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini. Pemanfaatan Program KUBE pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha

**Kata Kunci :** Pemberdayaan, Aktivitas, Kelompok Usaha Bersama, Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

KUBE merupakan salah satu program yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Landak untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Landak. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Daerah Kabupaten Landak dengan pendekatan spesifik melalui tahapan membangun kesadaran berkelompok untuk kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, ekonomi produktif dengan mengembangkan usaha yang mampu memberi nilai tambah ekonomis dan kemandirian melalui infrastruktur ekonomi-sosial yang berkelanjutan.

Pendekatan pola kelompok KUBE dimana justru mendorong bagaimana masyarakat miskin mampu berdaya secara mandiri dan bersama-sama dengan masyarakat miskin lainnya. Budaya khas masyarakat Indonesia yang mengedepankan kegotong royongan, justru menjadi pilar utama dalam pengembangan KUBE ini. Pola KUBE justru memberi ruang yang luas dalam hal budaya lokal masyarakat.

Tugas pemerintah daerah lebih bersifat teknis yakni memetakan ekonomi kreatif dan membuat forum pertemuan rutin untuk menjalin komunikasi antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif pada masyarakat. Warga didorong secara sadar berinisiatif menjadikan daerah desa

Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sebagai daerah yang kreatif. menumbuhkan “iklim orang-orang”, membangun apa-apa yang yang diperlukan untuk mendukung kreativitas warga di semua ini dan membangun jejaring komunitas yang dapat menarik orang-orang kreatif. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan kreativitas, keterampilan, dan daya cipta untuk menciptakan lapangan kerja.

Pada tahun 2019 masyarakat Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang mendapat alokasi anggaran sebesar 20 juta rupiah. Angka ini bertambah pada tahun 2020 menjadi 40 juta rupiah. Masyarakat Desa Hilir Kantor terdapat 2 kelompok usaha yang mendapatkan Program KUBE. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi. memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE masyarakat miskin mendapatkan fasilitas

untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis.

Dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang. Melalui KUBE masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sesuai dengan ketentuannya KUBE merupakan kumpulan orang-orang fakir miskin yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan. Salah satu tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Hilir Kantor, melalui:

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara bersama dalam kelompok.
2. Peningkatan pendapatan.
3. Pengembangan usaha.
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota dan dengan masyarakat sekitar.

Terkait dengan hal tersebut, maka Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa pemerintah daerah turut ambil bagian dan tanggung jawab dalam upaya mengatasi kemiskinan (Pasal 27), berikutnya pasal 20 mengatakan bahwa, penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. Untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. Memperkuat para masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan public yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar.
- c. Mewujudkan kondisi dan dilingkungan ekonomi, politik dan social yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam memenuhi hak-hak dasar penngkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- d. Memberi rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi identifikasi penduduk dan rumah tangga miskin, pengembangan kapasitas penduduk dan rumah tangga miskin, penyusunan strategi dan program, pelaksanaan dan pengawasan, peran serta masyarakat dan perencanaan dan pengangguran penanggulangan kemiskinan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat

orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Suharto (2002:6) mengungkapkan definisi pemberdayaan lebih luas lagi sebagai berikut:

“Pemberdayaan dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial”

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasmita (2003:159) harus dilakukan melalui tiga langkah yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (enabling);
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering);
3. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi

Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yang disebut sebagai konsep dasar,

yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam kata lain bahwa dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat tersebut dikenal adanya berbagai perspektif yang berangkat dari asumsi dan sudut pandang yang berbeda. Perspektif tertentu memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain di samping kedua jenis sumberdaya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut juga dengan modal sosial atau energi sosial.

Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui defenisinya. Dimana disini defenisi pengembangan komunitas (*community development*) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintergarasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintergrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Penilaian semacam itu muncul karena dalam defenisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas.

Hal itu disebabkan karena berbagi karakteristik yang melekat pada konsep komunitas tersebut memungkinkan dalam kehidupan yang berada pada suatu lokalitas

tertentu terkandung adanya kesadaran kolektif dan solideritas sosial di antara para warganya. Kesadaran kolektif dan solideritas sosial akan merupakan modal sosial dan energi sosial yang cukup dalam mendasari tindakan bersama bagi peningkatan kehidupan bersama baik sosial, ekonomi maupun kultural. Agar tindakan bersama tersebut lebih bersandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya. Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun komunitas sebagai keseluruhan dan kebulatan kehidupan bersama.

Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui program KUBE yang dijelaskan oleh Kementerian Sosial melalui buku Pedoman KUBE (2011:4), meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), 28 huruf H ayat 3, pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan 2.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
  4. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota
  5. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan
  6. Permenkeu No. 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  7. Permensos RI No. 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial
  8. Permensos No. 129/HUK/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
  9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin.
  10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat
  11. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Sosial No. 05/SKB/M/V/1999 tentang 45/HUK/1999 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui Pembentukan Koperasi.
  12. Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor 293/2002 40/PEGHUK/2002 tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin
- Pengertian aktivitas adalah semua kegiatan seseorang dalam mengikuti suatu

kegiatan baik secara kelompok maupun perorangan atau individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:23) menyatakan bahwa: “Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan”.

Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan kerja sama disebut sebagai aktivitas sosial baik yang berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan manusia. Namun, berarti atau tidaknya kegiatan tersebut bergantung pada individu tersebut

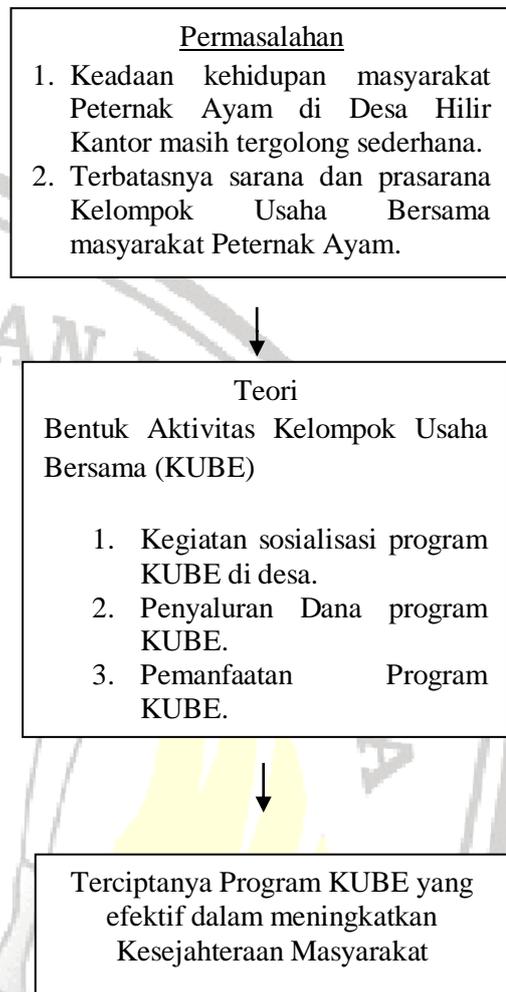
Adapun kriteria untuk mengukur aktivitas suatu organisasi atau kelompok ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

- a Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai

dengan rencana.

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Sosialisasi Program KUBE**

Bahwasanya yang dimaksud sosialisasi Program KUBE disini adalah

upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Program KUBE itu sendiri kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung Program KUBE di semua tingkatan.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi Program KUBE adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pengembangan kecamatan oleh pelaku-pelaku pendukung Program KUBE dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang Program KUBE, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja melainkan secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program.

Selain melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program KUBE dilakukan melalui media informasi. Beberapa media informai yang digunakan dalam proses sosialisasi Program KUBE antara lain :

1. Tokoh masyarakat (agama, adat) yang ada dilokasi program

Tokoh masyarakat yang ada dipedesaan seringkali merupakan menjadi tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya. Karena itu keberadaan tokoh tersebut merupakan alternative sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi Program KUBE.

## 2. Media cetak dan elektronika.

Media cetak seperti majalah, bulletin, surat kabar, media elektronika seperti radio, televise serta informasi melalui gereja menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan informasi mengenai Program KUBE kepada masyarakat.

## 3. Papan informasi

Papan informasi merupakan media penyebarluasan informasi Program KUBE yang diwajibkan keberadaannya untuk diletakkan di kecamatan dan di desa. Bahkan dari itu papan informasi tersebut di tempatkan di pada tempat terbuka yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Program KUBE.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Sosialisasi tentang Program KUBE baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten sebaiknya tidak hanya melalui forum resmi sosialisasi Program KUBE tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara formal maupun informal terutama kepada instansi-instansi terkait, LSM dan perguruan tinggi sehingga tercapai suatu persepsi yang sama tentang Program KUBE. Dari itu fasilitator tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten haruslah lebih berperan aktif untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan tersebut.

Untuk materi yang disosialisasikan pun tidak hanya konsep Program KUBE yang ada di petunjuk Teknis operasional atau petunjuk resmi lainnya, tetapi proses, permasalahan yang terjadi dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program KUBE di masyarakat juga perlu disebarluaskan. Dengan mengetahui konsep Program KUBE secara utuh dan tahu apa yang terjadi dilapangan akan sangat membantu para pelaku pendukung program Program KUBE dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Begitupun untuk sosialisasi ditingkat masyarakat, informasi tentang Program KUBE jangan hanya disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat tentang Program KUBE itu sendiri. Masyarakat pada dasarnya akan tertarik, menerima informasi suatu program yang datang dari luar dan

akan mau berperan serta untuk memberikan kontribusinya jika mereka merasakan ada manfaat yang yang dapat diambil. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Program KUBE merupakan salah satu jembatan bagi masyarakat desa dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

## **2. Penyaluran Dana**

Untuk kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Ngabang terdapat beberapa kelompok usaha yang terdaftar. Beberapa kelompok tersebut mempunyai jenis usaha yang pada umumnya bergerak dalam usaha Industri Pengelolaan Ikan.

Proses peternakan Ayam ini dilakukan secara manual, tanpa sentuhan teknologi, dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, Seperti yang dikemukakan oleh Koordinator Kelompok Peternak Ayam

”usaha ini saya dirikan pada tahun 2017, dengan modal yang kecil. Waktu itu, kondisi sangat miskin, pendapatan sebagai Peternak Ayam hanya cukup untuk membeli beras, ikan dan sayur sehari-hari. Waktu itu, saya mulai berpikir, kira-kira usaha yang bisa menambah penghasilan..”

Demikian pula pernyataan Anggota kelompok Peternak Ayam:

“dulunya....saya hanya Peternak Ayam biasa, akhirnya saya ikut-ikut

dengan Kelompok Usaha Peternak Ayam. Bergabung dengan kelompok usaha bersama (KUBE) .”.

Mengenai fluktuasi harga, Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Koordinator Kelompok Usaha Peternak Ayam:

”kalau ada perubahan harga bahan baku, kami juga sesuaikan dengan harga jual, karena keuntungan yang diperoleh tidak banyak...jadi, kalau tidak dinaikkan juga, maka kami bisa rugi”.

Hasil wawancara dengan Anggota Kelompok Usaha Peternak Ayam:

”kalau harga bahan naik, kami juga menaikkan harga produk, tapi tidak banyak, yang penting sesuai dengan harga dan tidak merugi. Karena keuntungannya kecil, yang penting perputaran barang bagus dan pembayaran tidak terlambat”.

Sepintas lalu program Kelompok usaha bersama ini memang agak mirip dengan kegiatan usaha ekonomi Produktif adapun yang membedakan antara Kelompok usaha bersamadengan usaha ekonomi produktif ini adalah pada Kelompok usaha bersamayang mengelolanya adalah khusus perempuan sedangkan di usaha ekonomi produktif dikelola oleh campuran antara perempuan dan laki-laki yang mempunyai usaha sendiri.

Secara umum kegiatan simpan pinjam yang pengelolaannya diberikan kepada perempuan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Dari apa yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ngabang tersebut dapat diukur bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan masyarakat dalam program KUBE di Kecamatan Ngabang yakni terbatasnya modal usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dikarenakan adanya pembagian yang dilakukan oleh pihak pelaksana program ini secara merata. Serta diharapkan untuk seterusnya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ngabang dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan yang didalamnya berupa pelatihan usaha dan dukungan kelembagaan, dan penghantaran sumber daya berupa bantuan modal usaha dan dukungan sarana dan prasarana kepada kelompok usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa indikator yang telah dikemukakan diatas mencerminkan suatu upaya menuju suatu perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya dalam pemenuhan kebutuhan yang dirasakan sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. Oleh karenanya jenis kegiatan/program tersebut perlu untuk dilaksanakan sebagai konsekwensi tanggungjawab moral pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat utamanya didaerah pedesaan

#### **4. Pemanfaatan Program KUBE**

Pelaksanaan Program KUBE untuk Kecamatan Ngabang terkhusus dalam pemberdayaan bidang ekonomi mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat begitu pun juga dengan aparat pemerintah setempat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Ngabang mengenai keberadaan Program KUBE diwilayahnya menyatakan bahwa :

“Keberadaan Program KUBE untuk Kecamatan Ngabang ini diharapkan banyak membawa perubahan yang signifikan utamanya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Kecamatan Ngabang . Diharapkan terjadinya proses pembelajaran politik demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu untuk menganalisis, mampu dalam menyatakan pendapat, berdiskusi, serta mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan”(sumber informan :

Sekretaris Kecamatan  
Ngabang, 06 Desember 2020)

dalam perencanaan Program KUBE  
diwilayahnya menyatakan bahwa :

Sebagaimana di dalam perencanaan kegiatan atau pada proses perencanaan program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, diarahkan dalam menyampaikan gagasan, ide, keluhan-keluhan yang dirasakan selama ini yang kemudian ditampung untuk dijadikan prioritas usulan. Pada dasarnya dari hasil proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Ngabang banyak ide serta usulan yang dilemparkan masyarakat. Namun tidak semua usulan tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngabang terdapat 40 kelompok usaha usaha kecil menengah, yang skalanya masih menengah ke bawah atau masih dalam taraf industri rumah tangga. Melihat kondisi yang ada, UKM ini sangat potensial untuk dikembangkan utamanya dalam menunjang pendapatan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan Program KUBE di lihat dari kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Ngabang yang dilakukan oleh pelaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat dusun/lingkungan. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Ngabang mengenai Partisipasi masyarakat

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program KUBE Kecamatan Ngabang ini memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. diakibatkan oleh bersamaannya kegiatan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri musyawarah tersebut.” (sumber informan : Sekretaris Kecamatan Ngabang, 06 Desember 2020)

Oleh karena itu hendaknya setiap kegiatan atau tahapan Program KUBE utamanya dalam Musyawarah di tingkat desa diharapkan agar tetap memperhatikan jadwal atau kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai sasaran program, mengingat bahwa dalam proses penentuan prioritas kegiatan disitulah letak awal perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan keterlibatan masyarakat disini sangat

diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Selanjutnya dalam proses musyawarah ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses penentuan inimasyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya dalam proses penentuan prioritas kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses ini, masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dari hasil wawancara dengan Fasilitator bid. pemberdayaan UPK Kecamatan Ngabang mengenai Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program KUBE menyatakan bahwa :

“Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang diprioritaskan terlihat memiliki kendala, dikarenakan masih ada sejumlah masyarakat yang hanya datang, duduk, dengar, dan diam dalam proses penentuan kegiatan. Hal tersebut diakibatkan dari adanya budaya masyarakat kita yang masih takut, dan malu untuk berbicara

dimuka umum sehingga mereka terkesan hanya datang untuk turut meramaikan dan menerima apapun keputusan yang diambil. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk lebih meningkatkan keaktifan masyarakat tersebut baik melalui peningkatan SDM melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal.”

*(sumber informan : Fasilitator bid. pemberdayaan UPK Kecamatan Ngabang ,07 Desember 2020)*

Perlu kita pahami bersama bahwa keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa setiap masalah atau kendala yang dihadapi, yang tahu dan yang merasakannya adalah masyarakat itu sendiri oleh karenanya yang membuat solusi dari permasalahan tersebut adalah harus dari kalangan masyarakat itu sendiri (bottom up)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan Program KUBE menyatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program KUBE Kecamatan Ngabang dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat tidak sepenuhnya mencapai 100% dimana hal ini dipengaruhi oleh tahapan atau jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali bertabrakan dengan pekerjaan sehari-hari sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari mereka sebagai sumber pendapatan utama, namun dari segi minat secara menyeluruh masyarakat masih terus memberikan partisipasi dalam segala kerja kelompok (*sumber informan : Kepala UPK Kecamatan Ngabang ,07 Desember 2020*)

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPK Kecamatan Ngabang mengenai Partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan/materi Program KUBE menyatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan/materi Program KUBE Ngabang bagus pasalnya tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan segala aturan peminjaman dana sebagai pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat sesuai dengan dokumen yang dikirim ke pusat agar

memudahkan partisipasi masyarakat pada tingkat pemeliharaan hasil kegiatan tersebut. .” (*sumber informan : Kepala UPK Kecamatan Ngabang ,07 Desember 2020*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program KUBE dirancang oleh pemerintah dalam beberapa bentuk yang diantaranya dalam pelaksanaan program fisik melalui pembangunan sarana, prasarana dan program ekonomi melalui kegiatan koperasi serta bantuan ekonomi lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat di daerah-daerah pelosok, khususnya daerah tertinggal. Dalam penelitian ini diuraikan terperinci beberapa efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngabang. Program KUBE merupakan program nasional yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat miskin desa dan masyarakat pengangguran desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program adalah indikator utama yang digunakan dalam menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan program. Rangkaian Aktivitas program KUBE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimulai dari (1) Kegiatan sosialisasi program KUBE di desa, (2) Penyaluran Dana program KUBE , dan (3) Pemanfaatan Program KUBE. Seluruh rangkaian aktivitas program KUBE secara ideal harus dapat memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana utamanya.

Pembentukan kelompok masyarakat usaha Peternak Ayam ini sebaiknya diatur oleh masyarakat sendiri, agar mereka dapat belajar bagaimana bekerjasama dan mengatur serta memilih ketua yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk memimpin. Hal ini dilakukan agar mereka terbiasa menghadapi kondisi yang sama untuk mendorong proses pemberdayaan itu sendiri.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagaibentuk pemberdayaan yang paling efektif yang biasa disebut sebagai *collective self-empowerment*. Kelompok yang terbentuk ini juga memiliki potensi untuk membuat *network social* dengan LSM untuk memperkuat relasi pemberdayaan, sehingga terjadi *dialogical encounter* yang akan menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok akan menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Kehadiran Program KUBE di Kecamatan Ngabang sangat penting apabila dipandang dari tujuannya bahwa merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh

pemerintah dalam rangka upaya mengatasi kemiskinan secara nasional termasuk di Kecamatan Ngabang sendiri. Artinya tujuan umum dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah yang lebih difokuskan pada persoalan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Efektif pelaksanaan program Program KUBE di Kecamatan Ngabang ini tentunya tidak terlepas dari masalah dan kendala yang sifatnya mempengaruhi pelaksanaan Program KUBE itu sendiri baik secara teknis maupun non teknis.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program KUBE secara umum dengan melihat kondisi pelaksanaan Program KUBE di kecamatan Ngabang adalah sebagai berikut :

#### **a. Partisipasi Masyarakat**

Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan Program KUBE. Sebagaimana mekanismen kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program KUBE mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program

KUBE hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat.

Dari apa yang terjadi di Kecamatan Ngabang kita bisa melihat bahwa salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan Program KUBE adalah tingginya respon masyarakat terhadap Program KUBE itu sendiri. Masyarakat menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam Program KUBE ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sehingga proses pelaksanaan Program KUBE menjadi lebih lancar.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat tersebut tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat melalui sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitupun juga sumbangan dalam bentuk lahan dan material bagi kepentingan Program KUBE itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada masyarakat itu sendiri.

Dalam program KUBE keterlibatan masyarakat menjadi syarat mutlak kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada dasarnya program ini memang menginginkan adanya pelebagaan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam program KUBE di mulai dari proses perencanaan program yaitu mulai kehadiran dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pengurus Program KUBE. Begitupun juga ketika dilakukan penggalian gagasan masyarakat dituntut untuk lebih pro aktif dalam menyampaikan ide, gagasan maupun saran bagi kepentingan pembangunan desa. Setelah proses perencanaan dilakukan masyarakat kembali dituntut partisipasinya dalam bentuk tenaga, waktu, serta material dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Begitupun setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan serta menjaga dan memelihara hasil dari program tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari Program KUBE tersebut dapat tercapai.

#### **b. Sumber Daya Manusia.**

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program KUBE yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku Program KUBE itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan program maka pelaku Program KUBE di tuntut untuk lebih bekerja keras, penuh keuletan, serta tak mengenal lelah dalam mensukseskan program ini.

Yang menjadi sorotan utama dalam program ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku Program KUBE. Jika ditinjau dari kemampuan pelaku

Program KUBE, pelaku ditingkat desa/kecamatan yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengelolaan kegiatan.

Padahal pada kenyataannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan program ini adalah para pelaku ditingkat desa/kelurahan tersebut. Keterlibatan pelaku pada level atas dalam Program KUBE ini hanya bersifat membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi semua kegiatan. Sedangkan yang paling berperan pada tahap pelaksanaan program dilapangan adalah fasilitator kecamatan, fasilitator desa, dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK),serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Fakta membuktikan bahwa terhadap Program KUBE di akui personil yang telah dipilih menjadi pengurus mempunyai tingkat pemahaman kurang sehingga hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan program di desa terkadang menemui kesulitan bahkan terjadi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh personil itu sendiri.

Dengan demikian untuk mengantisipasi persoalan mengenai kemampuan pelaku Program KUBE dalam mengelola kegiatan ini adalah dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinyu dan menyeluruh. Pelatihan tersebut lebih diberikan kepada para pelaku ditingkat desa/kelurahan sebagai bekal dalam menjalankan program serta bekal sebagai pelaku yang secara langsung akan

menghadapi masyarakat sebagai sasaran program KUBE.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, baik pada penduduk miskin yang terlibat pada Kelompok Usaha Peternak Ayam maupun yang masih bertahan dengan kondisi kemiskinan, ditemukan fakta-fakta empiris bahwa pemberdayaan masyarakat miskin yang selama ini menjadi rencana program khususnya di Kecamatan Ngabang belum terlaksana secara efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dana, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta tingkat partisipasi aktif masyarakat masih kurang. Selain itu, program Program KUBE baik melalui pemberian modal tidak banyak membantu, karena tidak diiringi oleh model-model pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang rendah (miskin), merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, melakukan upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok; *kedua,*

berupaya untuk membantu masyarakat melalui pemberdayaan agar mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat antara lain pengembangan berbagai usaha produktif yang merupakan potensi kewilayahan.

Kelompok Peternak Ayam ini bisa dibentuk dari organisasi pemuda, karang taruna maupun LKMD yang telah ada sebelumnya. Melihat jumlah anggota setiap organisasi yang ada, maka tahap reorganisasi memiliki potensi untuk berhasil. Pada tahap selanjutnya, dibentuk kelompok pengrajin baru yang belum pernah ada sebelumnya, dengan pembagian pada setiap Rukun Warga. Struktur organisasi dibentuk sesuai dengan keinginan anggota. Dalam kelompok baru ini, ada aturan yang mengikat setiap anggota, misalnya mengenai pembagian kerja dan mekanisme pembagian keuntungan.

Kelompok atau organisasi yang terbentuk ini bukan saja sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengelolaan ikan, tetapi juga merupakan tempat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Penghantaran sumberdaya yang dimaksudkan dalam program pemberdayaan ini dapat berupa sumberdaya fisik, materi atau sumberdaya manusia. Sumber daya fisik diantaranya seperti bengkel atau *work shop*,

dimana didalamnya terdapat berbagai peralatan yang akan digunakan untuk pembuatan tenun ikat. Sumber daya materi adalah bahan-bahan dasar pembuatan tenun ikat, seperti Benang seda, benang, alat celup. Sedangkan sumberdaya manusia berupa keterampilan dan kemampuan membuat ikan olahandengan kualitas yang lebih baik.

Sebenarnya, proses penghantaran sumber daya ini telah dilakukan oleh Para pelaku Program KUBE melalui pemberian bantuan modal pada tahun anggaran 2010, dengan sistem pengembalian secara bergulir dengan bunga yang rendah. Seperti dikemukakan oleh Kepala UPK :

”sebagai instansi teknis dalam pemberdayaan UKM, kami sudah memberikan sentuhan modal atau penguatan struktur permodalan, namun ini kan program KUBE dalam kaitannya dengan UKM, jadi dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin masih jauh dari harapan”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Kelompok Usaha Peternak Ayam:

”saya memang mendapat bantuan modal dari Program KUBE dengan sistem pengembalian setiap bulan, bunganya ringan, tapi memang bukan untuk masyarakat miskin secara langsung, hanya kepada pengrajin dengan

membentuk kelompok di setiap desa”.

Penjelasan dari Camat Ngabang juga memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya proses penghantaran sumber daya ini pada dasarnya sudah ada, namun belum menyentuh masyarakat miskin secara langsung. Karena pada dasarnya, program pemberdayaan masyarakat miskin ini memang belum ada yang menangani secara berlanjut.

KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi.

Hal yang paling penting dalam pemberian bantuan sumber daya ini adalah bahwa sumber daya yang akan digunakan merupakan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Ngabang, yang diharapkan bahwa setelah selesainya program pemberdayaan ini, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya penghantaran sumber

daya sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Salman (2002) bahwa peranan pihak luar dalam hal ini adalah LSM atau donatur bukanlah pelaku yang merencanakan, mendesain dan mengambil keputusan tentang agenda perbaikan nasib kalangan miskin. Mereka hanyalah fasilitator, pendukung dan penguat dari agenda yang direncanakan dan diimplementasikan oleh masyarakat miskin melalui organisasi setempat. Dampak suatu program pemberdayaan masyarakat miskin tidak mudah diwujudkan sesuai dengan keinginan dan harapan yang dipikirkan. Kalaupun terwujud, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mengubah pola pikir dan pola tindak bagi masyarakat miskin di perkotaan sangat sulit.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Aktivitas sosialisasi Program KUBE telah dilaksanakan oleh di kecamatan Ngabang dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menghadiri kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KUBE

- b. Aktivitas penyaluran dana Untuk kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Ngabang telah dilaksanakan, Kecamatan Ngabang menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok usaha telah mendapatkan penyaluran dana dari program KUBE, dana diberikan sebesar 540.525.600 dengan sifat dana sebagai pinjaman dan akan digulirkan kembali pada kelompok yang lain Program pemberdayaan Program KUBE di kecamatan Ngabang setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini.
- c. Pemanfaatan Program KUBE pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. Program KUBE merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan

manusia khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Ngabang.

## **B. Saran**

- a. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima bantuan KUBE membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun usahanya
- b. Selain itu diperlukan adanya penambahan dari pihak pengelola dan sukarelawan untuk menunjang program KUBE inidan Perlunya pengawasan program ini agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan yang dihadapi
- c. Perlu adanya tim pendamping khusus untuk setiap KUBE yang terbentuk di tingkat desa, karena proses pendampingan harus dilakukan secara intens sebelum KUBE tersebut dapat dikategorikan dalam tahap kelompok usaha mandiri

## F. Referensi

- Alwi, Hasan dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis dan Martani. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nogi Tangkilisan, Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 1978. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga..
- Sulistiyani, A.T. 2004 *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gavamedia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos